

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia. Bogor, 2005
- Hans kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Indah, Bandung, 2013
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008
- K.C Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2015.
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Publik "Perihal Negara Masyarakat Sipil, Dan Kearifan Lokal Dalam Perspektif Politik Kesejahteraan"*, Setara Press, Malang, 2017
- Moh. Kusnadi, dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Politik Hukum Di Indonesia*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2014
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum "Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Mandinah dan Masa Kini"*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003,
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006
- Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : UII Press. 2006
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2017
- Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005

Hukum Pemerintahan Daerah, Yogyakarta : Nusa Media. 2009

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003

Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Soehino, *Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta. 2010.

Syaukani dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003

Teguh Prasetyo, dan Arie Purnomo, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014

Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

Tutik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana. 2011

Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009

Yusa, I Gede, *Hukum Tata Negara*, Setara Press, Malang, 2016

Jurnal :

Muryanto Amin, *Konsep Negara Kesejahteraan dari Waktu ke Waktu*, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Vol. 3 No. 2, Juli 2011

Abdul Rokhim, *Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan*, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, FH Unisma Malang, Vol. XIX No. 36, Pebruari-Mei 2013

Website :

Hukum Online. Nasib Kelanjutan Wewenang Delegasi Ketika Pejabat Berganti, 30 Oktober 2019,

<<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5db4ce5c950bd/nasib-kelanjutan-wewenang-delegasi-ketika-pejabat-berganti/>> [1 April 2020]

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/> diakses pada 29 Januari 2022

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Manual LPPD)

Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Serta Staf Ahli Bupati Tegal